BAB III

PARTISIPASI RAKYAT MADURA DALAM PEMBENTUKAN NEGARA MADURA

A. Kondisi Rakyat Madura

Melihat kondisi rakyat Madura saat itu, Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bekas pegawai pasar Klampis (Bangkalan) pada tanggal 13 Januari 1948 tentang keadaan dari wilayah daerah Madura. Terlihat Residen Tjakraningrat bersama Van der Plas, R. Oesman (bekas asisten wedana Burneh) dan Abu Hasan (bekas pembantu bupati Bangkalan), melakukan perjalanan ke seluruh Madura guna untuk melihat situasi yang terjadi di Madura.[1]

Saat itu kondisi rakyat Madura cukup memperihatinkan, dari sektor sosial dan ekonomi keadaan rakyat Madura terlihat mencengangkan, bahan makanan sulit didapatkan, di pasar harga beras RI,- (nica) per kg. Bahan pangan yang dijual hanya beras menir saja serta rakyat tidak memperoleh pembagian garam, perederan uang menjadi kacau karena pedagang Tionghoa tidak mau menerima uang republik sehingga dipasar orang tidak mau menerima uang republik. Rakyat kesulitan mendapat uang nica, sehingga perdagangan dikuasai oleh orang Tionghua. Keadaan buruh rendahan sangat menderita, pegawai dapat melakukan transaksi jual beli beras kalau ada, itupun beras menir saja seharga f. 0,60 per kg. Terjadinya rasionalisasi

[1]Surat dari Dewan Pimpinan Perjuangan Madura kepada P.T. sekertaris Djendral Kementrian Penerangan di Jogjakarta tentang Kondisi Madura tanggal 13 Januari 1948 (Arsip Kementrian Penerangan No. 99).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pengurangan pegawai) pegawai kereta api sebanyak 1.360 orang PPBM dan KA. Kesehatan rakyat sangat terganggu karena berjangkitnya penyakit disentri, malaria, kolera dan penyakit kulit baik di desa maupun di kota. Di sekolah rakyat diharuskan memakai bahasa Belanda dikarenakan guru yang mengajar memakai bahasa Belanda. Partai Persatuan Kebangsaan Madura (PKM) tidak mendapat kemajuan, meskipun banyak mengadakan propaganda dan setengah paksaan pada pegawai-pegawai. Surat tanda anggota yang dibeli oleh rakyat dengan harga RI. 50 tidak berlaku lagi. Pencurian, judi dan perkelahian antar warga (carok) terjadi dimana-mana, walaupun Belanda menerapkan peraturan yang keras. Penjagaan tetap dilakukan oleh barisan Tjakra dikarenakan jumlah tentara Belanda sedikit tanpa disertai persenjataan.[2]

Jaminan rakyat berupa jagung, tiap bulan sekitar 3 kg beras yang hanya disediakan untuk pegawai pensiunan dan *onderstanan*, sementara perdagangan dipegang oleh Tionghoa dengan perhubungan ke Surabaya atas ijin *Recomba*. Uang suap berlaku untuk para sopir M.T.D ke Surabaya dan penjaga pantai dengan pedagang dengan kurs NICA : ORI = 1:1, dari pihak Belanda tambah giat melakukan pembersihan, hal ini dilakukan untuk memberantas kejahatan yang terjadi sehinnga pihak Belanda mengeluarkan ultimatum, yakni: a) Pencurian harus ditembak, b) Barang siapa yang kedapatan menyimpan senjata api akan dihukum seumur hidup atau seringan-

[2]Ibid., No. 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ringannya 20 tahun penjara. Pengumuman ini ditandatangani oleh Mayor Jenderal Baai-Jawa Timur pada bulan Februari 1948.[3]

B. Dampak Pembentukan Negara Madura Tahun 1949.

Dengan dibentuknya Negara Madura maka berdiri beberapa negara bagian, dibawah Negara Republik Indonesia serikat yang demokratis dan berdaulat. Penyampaian *verslaag* pada rapat penentuan komite penentuan kedudukan Jawa timur di gedung nasional Indonesia (GNI) yang disampaikan oleh tuan A.J Muntu yang diantaranya yang diterangkan bahwa sesudah ditandatanganinya naskah Linggarjati tahun 1946, pembentukan Negara Indonesia serikat disetujui oleh rakyat dan Belanda sehingga terbentuklah dewan federal.[4]

Akan tetapi bersamaan dengan itu rakyat Madura semakin tidak puas akan perkembangan dan keadaan negara mereka, karena sampai lama Madura yang terbentuk menjadi sebagai sebuah negara tidak memiliki undang-undang dasar maka timbul ungkapan bahwa negara Madura hanyalah negara sandiwara belaka. Status ketatanegaraan juga tidak jelas karena tidak ada penyerahan kekuasaan dari tangan tentara dan pemerintahan pendudukan Belanda kepada orang Madura. akibatnya tidak ada organisasi pemerintahan selayak sebuah negara kecuali kerangka dan aparat yang ditinggalkan republik dulu. Hanya saja dipuncaknya kini berkuasa orang-orang *recomba* untuk

[3]Turunan surat adari Anggaran Dasar dari Panitia Perjuangan Madura Jogjakarta pada tanggal 16 Maret 1948 No. 11atau Patau PPM tentang kesimpulan dari kejadian-kejadian di Madura tanggal 12 Februari 1948 (Arsip Kementrian Penerangan No. 99).

[44]Turunan Surat Rahasia dari Kementrian Penerangan DJawatan Publikasi Jogjakarta bagian Sekertaris tanggal 25 Januari 1948 (Arsip Kementrian Penerangan No.159)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menangani masalah keuangan, kehakiman, keamanan dan lain-lain secara darurat. Para pegawai tertekan karena tidak bebas menyuarakan pendapat atau berpakarsa. Setiap bentuk pertemuan umum dilarang dan di partai politik tidak diperbolehkan berfungsi. Rakyat gelisah hidupnya sebab kecurigaan terdapat dimana-mana. Sampai ketika orang yang bersaudara kandung dapat pecah akibat ikut kelompok non kooperator atau membelah pihak pengikut Belanda.

Baru dalam September 1949 peraturan Negara Madura baru disahkan oleh recomba sehingga dewan perwakilan rakyat yang ada mulai berfungsi sebagai suatu parlemen. Suatu bentuk pemerintahan eksekutif tetapi dengan orang Belanda tetap mengepalai departemen keuangan. Dengan sendirinya golongan republik tidak tinggal diam melihat perkembangan ini. Gerakan bawah tanah seperti Gerakan Rakyat Indonesia Madura (GRIM), Gabungan Tentara Terpendam (GATET) dan Gerakan Pemuda Madura (GPM) aktif bergerak untuk mengacaukan jalan pemerintahan negara boneka itu. Begitu pula Persatuan Alim Ulama Madura (PAUM, penampung kegiatan barisan *sabilillah*) gerakan rahasia tentara *hisbullah* dan lain-lain tumbuh subur untuk melawan perkumpulan kyai Madura (PKM) yang diciptakan recomba.[5]

Wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia (RI) dan pemerintah negara dan daerah yang akan menjadi bagian dari RIS serta komite nasional Indonesia pusat (KNIP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari masing-masing negara atau daerah bagian tersebut pada tanggal 14 Desember 1949

[5]Ibid., No.159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah berkumpul di jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta dalam suatu pertemuan untuk permusyawaratan federal.

Pertemuan tersebut membicarakan dan kemudian menyetujui naskah undang-undang dasar sementara yang sebelumnya telah disetujui oleh Delegasi RI dan wakil-wakil daerah di *Scheveningen* tanggal 29 Oktober 1949 selama berlangsungnya KMB sebagai konstitusi Republik Indonesia Serikat.[6]

Persetujuan tersebut dituangkan dalam sebuah piagam yang ditandatangani oleh wakil-wakil dari RI dan Negara atau daerah yang akan menjadi bagian dari RIS. Berdasarkan konstitusi ini, Negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia yaitu daerah bersama:

1. Negara Republik Indonesia yang meliputi daerah menurut *status quo* seperti dimaksud dalam Perjanjian Renvile.
2. Negara Indonesia Timur
3. Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta
4. Negara Jawa Timur
5. Negara Madura.
6. Negara Sumatera Timur, termasuk daerah *status quo* asahan selatan dan labuhan batu.
7. Negara Sumatera Utara.
8. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri, seperti: Jawa Tengah, Bangka Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur.

[6]Arsip Kementrian Penerangan, No. 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian.

Dalam sistem pemerintahan negara berdasarkan konstitusi ini presiden dan menteri-menteri (dipimpin seorang perdana menteri) secara bersama-sama merupakan pemerintah. Demikian pula dalam lembaga perwakilan dikenal istilah "dua kamar" yaitu senat dan dewan perwakilan rakyat. Senat merupakan wakil Negara atau daerah bagian dimana setiap Negara atau daerah bagian mempunyai dua anggota didalamnya. Sedangkan dewan perwakilan rakyat beranggotakan 150 orang yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama pemerintah dewan perwakilan rakyat dan senat melaksanakan kedaulatan negara. Pemerintah melaksanakan kekuasaan legislatif bersama-sama dewan dan senat. Dalam hal pelaksanaan kekuasaan perundang-undangan federal ini pemerintah melaksanakannya bersama-sama dengan dewan dan senat, sepanjang hal itu menyangkut satu, beberapa atau semua daerah bagian ataupun mengenai hubungan Indonesia Serikat dengan negara atau daerah bagian. Sedangkan untuk seluruh lapangan pengaturan selebihnya, dilakukan pemerintah bersama-sama dewan.[7]

Disamping memiliki kekuasaan legislatif yang agak terbatas tersebut, senat berfungsi pula sebagai penasehat pemerintah. Pemerintah bahkan wajib mendengarkan nasehat yang menyangkut urusan-urusan penting mengenahi negara atau daerah bagian atau hubungan Republik Indonesia serikat dengan negara atau daerah bagian dan penyusunan rancangan undang-undang darurat.

[7]Arsip Kementrian Penerangan, No.159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tanggal 2 November 1949 terbentuklah Negara Indonesia Serikat (RIS) sebagai konsekuensi dari hasil Konferensi Meja Bundar. Sebagai Presiden atau Kepala Negara yang pertama RIS adalah Sukarno, sedangkan Moh. Hatta sebagi Perdana Menterinya. Sementara yang diangkat sebagai anggota kabinet ternyata sebagian besar terdiri dari tokoh pendukung unitarisme dan hanya dua orang pendukung sistem federal yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung. Oleh karena itu di dalam kabinet kemudian muncul gerakan untuk membubarkan negara federal dan menggantinya dengan membentuk Negara kesatuan semakin kuat. Kondisi yang demikian juga berdampak terhadap sikap penduduk yang ada di daerah-daerah yang menjadi negara bagian.

Reaksi dari rakyat Madura yang menolak berdirinya Negara Madura diwujudkan dalam bentuk berdirinya organisasi gerakan perjuangan hingga dalam bentuk aksi masa secara besar-besaran. Salah satu organisasi yang sangat keras menolak berdirinya Negara Madura adalah Gerakan Perjuangan Madura. Organisasi yang berpusat di Pamekasan ini memiliki cabang diberbagai wilayah seperti Surakarta, Madiun, Nganjuk, Kediri, Blitar, Turen, Jombang, Babat, dan Tuban. Tujuan dari gerakan ini adalah menggerakkan rakyat Madura untuk memperjuangkan agar Pulau Madura tetap dalam lingkungan NKRI.[8]

Perjuangan untuk mempertahankan pulau Madura agar tetap berada di bawah NKRI ternyata juga bukan hanya dilakukan oleh penduduk Madura

[8] Muryadi, "Pendidikan Madura", dalam http:atauatauwww.lontarMadura.comataupemungutan-suara-pembentukan-Negara -Maduraatau#ixzz3lsvPnDge (19 Oktober 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada di pulau Madura saja, tetapi juga dilakukan oleh putra-putra Madura yang tinggal di wilayah lain. Pada tanggal 26 Februari 1948 putra-putra Madura yang ada di Jawa telah membentuk komunike yang diberi nama Panitia Perjuangan Madura.

Selain dengan membentuk berbagai organisasi perjuangan, rakyat juga melakukan demontrasi secara besar-besaran terutama ke gedung DPR. Masa demonstran terus mendesak agar dewan dibubarkan. Melihat reaksi para demonstran yang tidak dapat dibendung lagi maka dengan suara aklamasi sidang akhirnya mengambil keputusan menyetujui tuntutan rakyat untuk membubarkan dewan.Untuk pelaksanaan pembubaran Negara Madura, maka dibentuklah Panitia Pelaksana Resolusi DPR Madura yang beranggotakan wakil-wakil DPR Madura dan organisasi rakyat. Demonstrasi yang dilakukan berkali-kali secara besar-besaran ini akhirnya dapat memaksa Wali Negara Madura untuk meletakkan jabatan. Penyerahan jabatan Wali Negara ini kemudian diikuti dengan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Madura.[9]

Akhirnya Konfrensi Meja Bundar yang dinanti-nanti semua pihak itu diselenggarakan juga di Belanda. Konferensi ini diikuti oleh perutusan Republik Indonesia dan wakil-wakil negara boneka yang berjumlah belasan serta delegasi Belanda. Perundingan itu berhasil meratakan jalan bagi pelaksanaan pengakuan kedaulatan Indonesia sepenuhnya. Konferensi juga menyepakati pendirian sebuah Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri atas Republik Indonesia, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Indonesia

[9]Arsip Kementrian Penerangan, No.159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur dan negara-negara bagian lain-lain. Pengakuan kedaulatan dan penyerahan kekuasaan ini dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta yang menjadi ibu kota Republik Indonesia serikat.[10]

Beberapa hari sesudah Republik Indonesia serikat berdiri timbul pelbagai gerakan spontan masyarakat untuk menyatukan kembali negara-negara mereka dengan Republik Indonesia. Rakyat Madura termasuk yang paling awal memelopori gerakan untuk membubarkan negara ciptaan Belanda itu. Adanya Negara Madura sebagai bagian suatu negara federasi hanyalah merupakan sistem untuk mengikat Indonesia secara ekonomi pada bekas penjajahnya. Orang Madura menyadari bahwa biaya penyelenggaraan negara bagian itu mahal tidak mungkin dipikul oleh Madura sendiri.

Pada tanggal 2 November 1949 terbentuklah negara Indonesia Serikat (RIS) sebagai konsekuensi dari hasil Konferensi Meja Bundar. Sebagai Presiden atau Kepala Negara yang pertama RIS adalah Sukarno, sedangkan Moh.Hatta sebagi Perdana Menterinya. Sementara yang diangkat sebagai anggota kabinet ternyata sebagian besar terdiri dari tokoh pendukung *unitaris* medan hanya dua orang pendukung sistem federal yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung.

Oleh karena itu di dalam kabinet kemudian muncul gerakan untuk membubarkan negara federal dan menggantinya dengan membentuk negara kesatuan semakin kuat. Kondisi yang demikian juga berdampak terhadap sikap penduduk yang ada di daerah-daerah yang menjadi negara bagian.

[10]Arsip Kementrian Penerangan, No. 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Reaksi dari rakyat Madura yang menolak berdirinya Negara Madura diwujudkan dalam bentuk berdirinya organisasi gerakan perjuangan hingga dalam bentuk aksi massa secara besar -besaran. Salah satu organisasi yang sangat keras menolak berdirinya Negara Madura adalah Gerakan Perjuangan Madura.

Organisasi yang berpusat di Pamekasan ini memiliki cabang diberbagai wilayah seperti Surakarta, Madiun, Nganjuk, Kediri, Blitar, Turen, Jombang, Babat dan Tuban. Tujuan dari gerakan ini adalah menggerakkan rakyat Madura untuk memperjuangkan agar pulau Madura tetap dalam lingkungan NKRI. Perjuangan untuk mempertahankan pulau Madura agar tetap berada di bawah NKRI ternyata juga bukan hanya dilakukan oleh penduduk Madura yang ada di pulau Madura saja, tetapi juga dilakukan oleh putra-putra Madura yang tinggal di wilayah lain.

Pada tanggal 26 Februari 1948 putra-putra Madura yang ada di Jawa telah membentuk komunike yang diberi nama Panitia Perjuangan Madura. Selain dengan membentuk berbagai organisasi perjuangan, rakyat juga melakukan demontrasi secara besar-besaran terutama ke gedung DPR. Massa demonstran terus mendesak agar dewan dibubarkan. Melihat reaksi para demonstran yang tidak dapat dibendung lagi maka dengan suara aklamasi sidang akhirnya mengambil keputusan menyetujui tuntutan rakyat untuk membubarkan dewan. Untuk pelaksanaan pembubaran Negara Madura, maka dibentuklah Panitia Pelaksana Resolusi DPR Madura yang beranggotakan wakil-wakil DPR Madura dan organisasi rakyat. Demonstrasi yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkali-kali secara besar-besaran ini akhirnya dapat memaksa Wali Negara Madura untuk meletakkan jabatan. Penyerahan jabatan Wali Negara ini kemudian diikuti dengan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Madura.[11]

[11]Abdurachman, *Sejarah Madura Selayang Pandang* (Sumenep: Arsip Sumenep, 1971), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id